



Analisis Kepentingan Rusia dalam Menentang Kelompok LGBT melalui Pengesahan Undang-Undang Anti-LGBT Tahun 2022

Chatleen Kurnikova Najoran¹⁾, Adi Putra Suwecawangsa²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kepentingan Rusia dalam menentang kelompok LGBT melalui pengesahan Undang-Undang Anti-LGBT tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan UU Anti-LGBT 2022 tidak hanya berkaitan dengan isu moralitas publik, tetapi juga erat kaitannya dengan strategi politik identitas Rusia. Pemerintah Rusia menggunakan isu LGBT untuk menegaskan diri sebagai negara berlandaskan nilai konservatif, tradisi Ortodoks, dan norma keluarga tradisional yang berbeda dengan Barat. Selain itu, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen domestik untuk memperkuat legitimasi rezim, menekan oposisi, serta mengonsolidasikan dukungan dari masyarakat konservatif. Implikasi eksternalnya adalah semakin menguatnya citra Rusia sebagai penentang nilai liberal Barat, yang memperdalam jurang ketegangan dalam hubungan internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengesahan UU Anti-LGBT di Rusia mencerminkan perpaduan antara politik domestik dan kebijakan luar negeri yang berbasis identitas. Isu LGBT tidak sekadar menjadi persoalan hak minoritas, melainkan instrumen politik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mempertegas posisi Rusia di kancah global.

Kata-kunci : Identitas Nasional, Kebijakan Luar Negeri, LGBT, Rusia, Undang-Undang Anti-LGBT

Abstract

This study analyzes Russia's interests in opposing LGBT groups through the passage of the 2022 Anti-LGBT Law. The results show that the passage of the 2022 Anti-LGBT Law is not only related to public morality issues but also closely linked to Russia's identity politics strategy. The Russian government uses the LGBT issue to assert itself as a country based on conservative values, Orthodox traditions, and traditional family norms that differ from the West. Furthermore, this policy serves as a domestic instrument to strengthen the regime's legitimacy, suppress the opposition, and consolidate support from conservative societies. The external implication is the strengthening of Russia's image as an opponent of Western liberal values, which deepens tensions in international relations. Therefore, it can be concluded that the passage of the Anti-LGBT Law in Russia reflects a fusion of domestic politics and identity-based foreign policy. The LGBT issue is not merely a matter of minority rights, but a political instrument used to maintain power and strengthen Russia's position on the global stage.

Keywords : *Anti-LGBT Laws, Foreign Policy, LGBT, National Identity, Russia*

Kontak Penulis

Chatleen Kurnikova Najoan

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Bali,
Indonesia

Bali, Indonesia

Telp: +6281285308428

E-mail : chatleen.kn@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) telah menjadi salah satu tema penting dalam diskursus global tentang hak asasi manusia (HAM) selama dua dekade terakhir. Di banyak negara Barat, kelompok LGBT memperoleh pengakuan hukum yang semakin luas, mulai dari penghapusan kriminalisasi, pengakuan hak sipil, hingga legalisasi pernikahan sesama jenis. Perkembangan ini mencerminkan penerimaan terhadap nilai-nilai liberal yang menekankan kebebasan individu dan kesetaraan hak. Namun, kondisi ini tidak berlaku universal. Di sejumlah negara lain, terutama yang memiliki tradisi konservatif dan religius yang kuat, LGBT masih dianggap tabu, bahkan diposisikan sebagai ancaman terhadap nilai budaya dan identitas nasional.

Rusia menjadi salah satu negara yang mengambil sikap tegas terhadap kelompok LGBT. Sejak awal dekade 2010-an, pemerintah Rusia secara konsisten memperketat regulasi yang membatasi ruang gerak komunitas LGBT. Dimulai dengan pengesahan Undang-Undang “propaganda gay” tahun 2013, pemerintah melarang segala bentuk penyebaran informasi yang dianggap mendukung LGBT kepada anak-anak. Langkah ini mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional, tetapi justru memperkuat legitimasi politik di dalam negeri. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Anti-LGBT tahun 2022, yang memperluas larangan tersebut hingga mencakup seluruh masyarakat. Dengan undang-undang ini, representasi positif LGBT dilarang di media, film, iklan, internet, hingga kegiatan publik.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Rusia tidak sekadar berupaya menjaga moralitas publik, tetapi juga menggunakan isu LGBT sebagai instrumen politik identitas. Presiden Vladimir Putin dan elite politik Rusia sering menggambarkan diri mereka sebagai pelindung nilai-nilai tradisional dan keluarga heteronormatif yang berakar pada ajaran Gereja

Ortodoks. Dengan menolak LGBT, Rusia berupaya menegaskan dirinya sebagai benteng konservatisme global, yang berbeda dengan Barat yang dianggap terjerumus dalam dekadensi moral. Hal ini tidak hanya berdampak pada komunitas LGBT di dalam negeri, tetapi juga memperkuat narasi anti-Barat dalam politik luar negeri Rusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Apa kepentingan Rusia dalam menentang kelompok LGBT melalui pengesahan Undang-Undang Anti-LGBT tahun 2022?* Pertanyaan ini penting dijawab karena isu LGBT di Rusia tidak hanya terkait hak minoritas, melainkan juga mencerminkan strategi politik domestik dan kebijakan luar negeri yang berbasis identitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepentingan Rusia dalam menentang LGBT melalui kerangka konstruktivisme dalam hubungan internasional. Teori ini dipilih karena memberikan penjelasan mengenai bagaimana identitas, nilai, dan norma membentuk kepentingan negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika politik identitas di Rusia, serta kontribusinya dalam studi hubungan internasional kontemporer.

Signifikansi penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama, secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara politik identitas dan kebijakan luar negeri, khususnya dengan studi kasus Rusia. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana isu moral dan budaya dapat digunakan oleh negara sebagai instrumen politik domestik sekaligus sebagai alat dalam diplomasi internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian berasal dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, publikasi hukum, media massa,

serta dokumen resmi pemerintah Rusia. Analisis data dilakukan melalui penafsiran mendalam terhadap sumber-sumber tersebut.

Pendekatan konstruktivisme digunakan norma dalam menentukan kepentingan negara. Artinya, kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor material seperti ekonomi atau militer, melainkan juga oleh cara suatu negara memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia ingin dipandang oleh negara lain.

Dalam konteks Rusia, identitas sebagai negara dengan tradisi konservatif, religius, dan anti-liberal menjadi dasar bagi kebijakan anti LGBT. Selain konstruktivisme, konsep politik identitas digunakan untuk menjelaskan bagaimana isu moral seperti LGBT dipakai sebagai alat legitimasi politik. Sementara itu, studi mengenai konservatisme global (Edenborg, 2023) menunjukkan bahwa penolakan terhadap LGBT menjadi bagian dari koalisi wacana yang menghubungkan aktor domestik dengan agenda internasional.

Alasan penggunaan metode kualitatif adalah karena penelitian ini tidak berfokus pada data statistik, melainkan pada pemahaman makna di balik kebijakan Rusia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis wacana dan studi dokumen, dengan tujuan memahami narasi politik dan konstruksi identitas yang dibangun oleh Rusia melalui kebijakan anti LGBT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan LGBT di Rusia

Sejarah keberadaan dan perlakuan terhadap kelompok LGBT di Rusia menunjukkan dinamika panjang yang dipengaruhi oleh politik, agama, dan ideologi negara. Pada masa kekaisaran Tsar, homoseksualitas dipandang sebagai dosa dan penyimpangan moral. Gereja Ortodoks memainkan peran penting dalam menanamkan nilai bahwa hubungan sesama jenis merupakan pelanggaran terhadap hukum alam dan ajaran agama. Individu yang diketahui memiliki orientasi homoseksual

sebagai kerangka teoretis utama. Dalam hubungan internasional, konstruktivisme menekankan pentingnya identitas, nilai, dan

sering kali diasingkan dari lingkungan sosial dan hidup dalam stigma. Pada era Uni Soviet, terutama di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, homoseksualitas secara resmi dikriminalisasi pada tahun 1933. Pasal 121 dalam hukum pidana Uni Soviet menetapkan hukuman hingga lima tahun kerja paksa bagi pelaku hubungan sesama jenis.

Kebijakan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga sarat dengan ideologi, di mana homoseksualitas dianggap sebagai bentuk dekadensi Barat dan ancaman terhadap moralitas komunis. Rezim Soviet menekan komunitas LGBT secara sistematis, sehingga banyak yang memilih hidup tersembunyi.

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, terjadi perubahan signifikan. Tahun 1993 menjadi momen penting karena pasal kriminalisasi homoseksualitas dihapuskan. Langkah ini memberikan ruang hukum yang lebih bebas bagi komunitas LGBT. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap LGBT masih sangat rendah. Survei opini publik dari Levada Center pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat Rusia menolak keberadaan LGBT secara terbuka. Ini membuktikan bahwa liberalisasi hukum tidak sejalan dengan perubahan sosial.

Pada awal 2000-an, komunitas LGBT mulai membentuk organisasi, seperti Russian LGBT Network dan GayRussia. Mulainya gerakan yang mengadakan kampanye publik, dan berusaha melakukan parade kebanggaan. Namun, upaya tersebut sering gagal karena pemerintah menolak izin atau aparat membubarkan acara secara paksa. Contohnya, parade *gay* di Moskow tahun 2006 dibubarkan dengan kekerasan, dan banyak aktivis ditangkap. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun ada liberalisasi hukum, norma

konservatif tetap kuat dan digunakan negara untuk mengontrol masyarakat. Kondisi ini juga menegaskan bahwa walaupun secara hukum homoseksualitas tidak lagi dikriminalisasi, diskriminasi sosial dan politik tetap kuat. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perkembangan hukum dan penerimaan sosial di Rusia.

melarang segala bentuk kampanye atau representasi positif mengenai LGBT yang dapat diakses oleh anak-anak. Meski tujuan resmi undang-undang ini adalah melindungi anak-anak dari pengaruh yang dianggap merusak moral, kenyataannya UU ini digunakan sebagai dasar untuk membatasi kebebasan berekspresi dan menekan aktivis LGBT.

Aktivis LGBT melaporkan meningkatnya kasus kekerasan setelah UU 2013 diberlakukan. Banyak serangan dilakukan oleh kelompok vigilante yang memancing korban LGBT melalui media sosial, lalu melakukan penyerangan fisik dan merekamnya untuk dipublikasikan. Meskipun bukti jelas tersedia, aparat penegak hukum jarang menindaklanjuti laporan. Dalam banyak kasus, polisi bahkan menolak laporan dengan alasan bahwa korban sendiri yang menyalahi norma sosial.

Diskriminasi juga terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan. Guru atau dosen yang diketahui mendukung isu LGBT berisiko diberhentikan, sementara siswa LGBT sering mengalami bullying tanpa perlindungan. Di sektor kesehatan, beberapa laporan menunjukkan bahwa pasien LGBT sering menerima perlakuan diskriminatif dari tenaga medis, yang menganggap orientasi seksual sebagai 'penyakit' atau 'kelainan moral'. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan mental, dengan meningkatnya angka depresi, kecemasan, bahkan kasus bunuh diri di kalangan LGBT.

Akibat kebijakan ini, para individu homophobic semakin merasa memiliki legitimasi untuk melakukan serangan terhadap komunitas LGBT. Banyak kasus kekerasan

Diskriminasi dan Homophobia terhadap LGBT di Rusia

Diskriminasi terhadap LGBT di Rusia tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga dilegitimasi oleh kebijakan negara. Salah satu contohnya adalah pengesahan Undang-Undang 'propaganda gay' pada tahun 2013. UU ini

terjadi, mulai dari intimidasi hingga penyerangan fisik. Ironisnya, aparat penegak hukum seringkali tidak menindaklanjuti laporan korban, bahkan ada yang justru menyalahkan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa diskriminasi terhadap LGBT di Rusia tidak hanya terjadi di level masyarakat, tetapi juga dilembagakan dalam praktik negara.

Contoh nyata diskriminasi ini adalah pembubaran parade kebanggaan LGBT di Moskow yang hampir selalu ditolak perizinannya oleh pemerintah kota. Para aktivis yang mencoba melakukan aksi damai sering ditangkap, bahkan sebelum aksi dimulai. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya pasif membiarkan diskriminasi, tetapi juga aktif menghambat gerakan LGBT. Hal ini menegaskan bahwa homophobia di Rusia bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga bagian dari kebijakan negara.

Perkembangan Peraturan Anti-LGBT di Rusia

Dua tonggak utama regulasi anti-LGBT di Rusia adalah UU "propaganda gay" tahun 2013 dan UU Anti-LGBT tahun 2022. UU Propaganda Gay 2013, Undang-undang ini melarang segala bentuk informasi yang dianggap mempromosikan "hubungan seksual non tradisional" kepada anak-anak. Istilah ini ambigu dan memberi ruang bagi aparat untuk menekan aktivis LGBT. UU ini digunakan untuk membubarkan kegiatan, melarang buku atau film yang dianggap pro-LGBT, serta mendenda individu atau organisasi yang melanggar. UU Anti-LGBT 2022, UU terbaru memperluas cakupan larangan propaganda LGBT hingga ke seluruh masyarakat, bukan hanya anak-anak. Artinya, seluruh bentuk

representasi positif LGBT di media, iklan, film, pendidikan, hingga internet dilarang. Sanksinya lebih berat, termasuk denda besar, pencabutan izin usaha, hingga deportasi warga asing. UU ini menunjukkan langkah maju Rusia dalam menghapuskan eksistensi LGBT dari ruang publik.

Regulasi ini bukan sekadar kebijakan moral, tetapi juga alat kontrol negara untuk menciptakan keseragaman nilai sesuai dengan ideologi konservatif yang dijunjung pemerintah.

benteng nilai konservatif di tengah dunia yang semakin liberal.

Kedua, dari sisi politik normatif, kebijakan anti-LGBT digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi rezim. Dengan mengadopsi kebijakan ini, pemerintah memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat yang konservatif. Selain itu, isu LGBT juga digunakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik lain, seperti ekonomi yang stagnan atau korupsi.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga memiliki dimensi geopolitik. Rusia ingin menampilkan dirinya sebagai alternatif dari hegemoni Barat, dengan mengusung nilai konservatif sebagai basis ideologis. Dengan menolak LGBT, Rusia tidak hanya menegaskan identitas nasionalnya, tetapi juga berupaya membangun pengaruh di kalangan negara-negara lain yang memiliki nilai konservatif serupa.

Dampak Pengesahan UU Anti-LGBT 2022

Dampak dari pengesahan UU Anti-LGBT tahun 2022 sangat luas. Pertama, bagi komunitas LGBT, undang-undang ini semakin memperburuk kondisi mereka. Diskriminasi, stigmatisasi, dan kekerasan meningkat, sementara ruang gerak mereka untuk berekspresi semakin sempit. Banyak organisasi LGBT yang akhirnya dibubarkan atau dipaksa menghentikan aktivitasnya.

Kedua, dalam politik domestik, kebijakan ini memperkuat kontrol pemerintah terhadap masyarakat sipil. Dengan mengatur isu

Kepentingan Rusia dalam Menentang LGBT

Kepentingan Rusia dalam menentang LGBT dapat dianalisis melalui dua aspek: identitas nasional dan politik normatif. Pertama, dari sisi identitas, Rusia ingin menegaskan dirinya sebagai bangsa dengan nilai-nilai tradisional yang berbeda dengan Barat. Identitas ini diperkuat oleh peran Gereja Ortodoks Rusia yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan menolak LGBT, Rusia menampilkan dirinya sebagai moralitas, pemerintah memperoleh legitimasi dari kelompok konservatif, sekaligus menekan oposisi yang mencoba menggunakan isu hak asasi manusia untuk menentang rezim.

Ketiga, dalam hubungan internasional, pengesahan UU ini semakin memperburuk citra Rusia di mata dunia. Negara-negara Barat mengecam keras kebijakan ini dan menilai Rusia melanggar prinsip-prinsip HAM internasional. Hal ini memperdalam jurang antara Rusia dengan Barat, yang sudah tegang akibat konflik geopolitik lainnya. Rusia semakin dikucilkan dalam berbagai forum internasional, meskipun tetap berusaha mencari dukungan dari negara negara non-Barat.

PENUTUP

Pengesahan Undang-Undang Anti-LGBT tahun 2022 di Rusia menunjukkan bahwa kebijakan negara tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara nilai, identitas, dan kepentingan politik. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sikap Rusia dalam menentang LGBT tidak semata-mata didorong oleh alasan moralitas publik, tetapi lebih luas terkait dengan strategi politik identitas dan kepentingan geopolitik.

Pertama, dari aspek **identitas nasional**, Rusia berusaha menampilkan dirinya sebagai negara dengan fondasi nilai konservatif, tradisional, dan religius. Identitas ini diposisikan sebagai diferensiasi terhadap Barat yang dipersepsikan terlalu liberal dan permisif. Dengan demikian, isu LGBT dijadikan simbol

perlawanan budaya yang memperkuat narasi identitas Rusia. nasionalisme konservatif di dalam negeri.

Kedua, dari aspek **politik domestik**, UU Anti-LGBT digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi rezim Vladimir Putin. Dengan memposisikan pemerintah sebagai pelindung moralitas publik, negara memperoleh dukungan luas dari kelompok konservatif dan Gereja Ortodoks. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan perhatian dari persoalan lain, seperti ekonomi yang stagnan, kesenjangan sosial, dan kasus korupsi, dengan menghadirkan musuh bersama dalam bentuk “nilai-nilai asing” yang dianggap mengancam

Implikasi dari temuan ini cukup luas. Bagi kajian akademis, penelitian ini menegaskan pentingnya teori konstruktivisme dalam memahami kebijakan luar negeri. Faktor identitas, norma, dan nilai terbukti memengaruhi kebijakan Rusia terhadap LGBT, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan pendekatan materialis. Bagi praktik politik internasional, kasus ini memperlihatkan bahwa isu moral dan budaya dapat digunakan sebagai alat politik, baik untuk memperkuat legitimasi domestik maupun untuk membangun narasi ideologis dalam hubungan antarnegara.

Akhirnya, penelitian ini juga membuka peluang untuk studi lebih lanjut. Misalnya, membandingkan kebijakan Rusia dengan negara lain yang juga menolak nilai liberal Barat, seperti Hungaria atau beberapa negara Asia dan Timur Tengah, guna melihat apakah terdapat pola global dalam politik penolakan terhadap LGBT. Dengan demikian, isu LGBT dapat dipahami tidak hanya sebagai perdebatan tentang hak minoritas, tetapi juga sebagai bagian dari pertarungan ideologis dalam politik global kontemporer.

Daftar Pustaka

Ammah, D. M. (2019). Perlindungan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia Orang-Orang LGBT dengan Bantuan PBB. *Journal Universitas Udayana*.
 Agus, H. (2017). Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia

Ketiga, dari aspek **hubungan internasional**, kebijakan anti-LGBT memperkuat citra Rusia sebagai penentang nilai liberal Barat. Hal ini tidak hanya menambah ketegangan dalam hubungan diplomatik dengan Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga digunakan sebagai upaya membangun solidaritas dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan serupa mengenai nilai keluarga dan moralitas. Dengan demikian, isu LGBT dijadikan instrumen geopolitik untuk menegaskan peran Rusia sebagai benteng konservatisme global.

Terhadap The European Convention on Human Rights (ECHR) dalam Kasus LGBT. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(2).

[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/25.Jurnal%20Heni%20Agus%20Setyani,%20NIM%20%201102045118%20\(10-30-17-05-27-14\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/25.Jurnal%20Heni%20Agus%20Setyani,%20NIM%20%201102045118%20(10-30-17-05-27-14).pdf)

CNBC Indonesia. (2023, Juli 25). Putin Teken UU Anti Ganti Kelamin Rusia, Disebut Nilai Setan. *CNBC Indonesia*.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230725165738-4-457231/putin-teken-uu-anti-ganti-kelamin-rusia-disebut-nilai-setan>

CNN Indonesia. (2023, Februari 8). Alasan Putin Terapkan UU Anti-LGBT Sampai Denda Rp103 Juta. *CNN Indonesia*.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230207204916-134-910179/alasan-putin-terapkan-uu-anti-lgbt-sampai-denda-rp103-juta> Council for Global Equality. (2020). The Facts on LGBT Rights in Russia. *Global Equality*.
<http://www.globalequality.org/component/content/article/1-in-the-news/186-the-facts-on-lgbt-rights-in-russia>

Edenborg, E. (2023). *Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of Traditional Values*. *Problems of Post Communism*, 70(2).

Human Rights First. (2013, Agustus 8). Russia's Anti Gay Law, Spelled Out in Plain English. *Human Rights First*. <https://humanrightsfirst.org/library/russias-anti-gay-law-spelled-out-in-plain-english/>

Jackson, & Sorensen. (2019). *Introduction to International Relations*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Katsuba, S. (2023). The Decade of Violence: A Comprehensive Analysis of Hate Crimes Against LGBTQ in Russia in the Era of the "Gay Propaganda Law" (2010–2020). *International Journal of Evidence-Based Research, Policy, and Practice*.
<https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2167142>
- Meilanny, B. (2020). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Social Work Jurnal*, 6(2).
- Peterson, A., & Panfil, A. (2014). LGBTQ Youth: A Community in Crisis. Dalam *Youth, Crime, and Justice: A Global Perspective* (hlm. 47–75). Routledge.
- Refworld. (2023). Russia: Update to RUS13194 of 16 February 1993 on the treatment of homosexuals. *Refworld*.
<https://www.refworld.org/docid/3ae6ad788c.html>
- Tamsyah. (2017). Eropanisasi Kesetaraan Hak LGBT Studi Kasus Negara Polandia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*
- Schaaf, D. (2009). LGBT Rights in Eastern Europe: The Case of Russia. *European Journal of International Law*, 20(1), 291–308.
- SINDONews. (2023, Februari 15). Mengapa Transgender Dilarang di Rusia? Ternyata Ini Alasannya. *SINDONews*.
<https://international.sindonews.com/read/1023527/41/mengapa-transgender-dilarang-di-rusia-ternyata-ini-alasannya-1676451732>
- Statista. (2023, September 12). Russia: Attitudes Toward LGBT Persons. *Statista*.
<https://www.statista.com/statistics/1030193/russia-attitudes-toward-lgbt-persons/>
- Stella, A. (2015). The Queer Politics of LGBT Activism in Russia. *Russian Review*, 74(3), 438–460.